

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Stewardship

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori stewardship. Teori stewardship didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori *steward* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan bahwa eksistensi suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Ashari, 2020). Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (pemerintah) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

### 2.1.2 Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020, pengertian anggaran atau APBN/D yaitu “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Menurut Mardiasmo (2018:61), anggaran didefinisikan menjadi “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.”

### 2.1.3 Kinerja Anggaran

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 menyatakan bahwa “kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang terutang dalam dokumen anggaran”.

Menurut Mardiasmo (2018:84) kinerja anggaran dinyatakan bahwa “sistem kinerja anggaran pada dasarnya merupakan penilaian sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program”.

Kinerja Anggaran sangat menekankan pada konsep *Value for Money* atau pengawasan atas kinerja *output*. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, kinerja anggaran dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis (Rama, 2021).

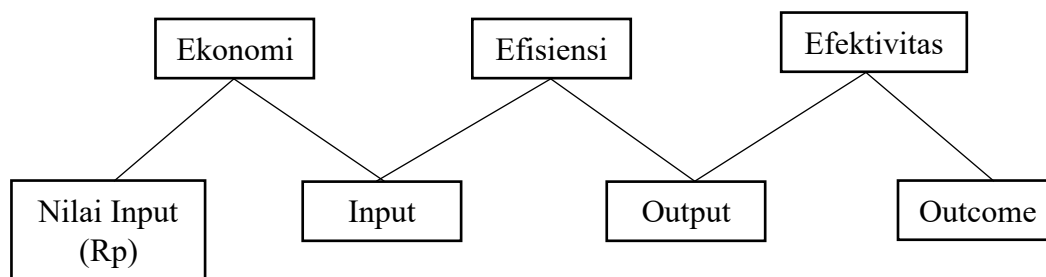
Menurut Mardiasmo (2018:86) menyatakan bahawa “dalam menyusun kinerja anggaran, organisasi atau unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja, tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (*output*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (*outcome*) dari program yang telah ditetapkan.”

### 2.1.4 Konsep Value for Money

Menurut Mardiasmo (2018: 5) konsep Value for Money yaitu:

“Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomi, merupakan perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.
2. Efisiensi, merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.”



Sumber: Mardiasmo (2018:6)

**Gambar 2. 1 Value for Money Secara Skematis**

### 2.1.5 Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “akuntabilitas adalah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Dalam Mardiasmo (2018:20) akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)  
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal mahalny biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### 2.1.6 Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018:30)

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan publik.”

Pendapat yang menyebutkan prinsip transparansi adalah dikemukakan oleh

*Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

### 2.1.7 Ketepatan Waktu

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa “pengukuran tepat waktu adalah tersedianya informasi saat dibutuhkan serta laporan yang sistematis dan teratur.” Menurut Chariri and Ghozali (2016:187), ketepatan waktu (*timeliness*) diartikan sebagai suatu informasi bagi pembuat keputusan pada saat

dibutuhkan dan sebelum informasi tersebut tidak lagi mempengaruhi sebuah keputusan.

Menurut Hendriksen & Breda (2000:145) dalam (Kristanti, 2019) “Ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan dan penyajian informasi selanjutnya harus secepat mungkin agar menjamin tersedianya informasi untuk yang membutuhkannya.” Indikator yang di gunakan dalam ketepatan waktu untuk kinerja anggaran dalam konsep *value for money* adalah diukur berdasarkan memberikan informasi yang akurat dalam kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintah, bisa memberikan informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kinerja yang baik dan tepat waktu yang di tentukan. Indikator-indikator yang mengukur tepat waktu adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan laporan keuangan
2. Jadwal penyusunan
3. Penyajian laporan keuangan
4. Pengambilan keputusan

### **2.1.8 Pengawasan**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa “Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Pengawasan adalah penilaian, evaluasi, dan kontrol terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang bertujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” Pengawasan, merupakan untuk menjamin agar anggaran benar-benar sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuannya yang telah

ditetapkan dan yang berlaku. Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi pengawasan (Mardiasmo, 2018:287), yaitu:

- 1) Input (masukan) pengawasan,
- 2) Proses pengawasan,
- 3) Output (keluaran) pengawasan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ditautkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai landasan dan referensi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik nantinya.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anak Agung Gede Dalem Sukawati Dewa Nata, Cokorda Gede Bayu Putra (2023)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Instansi Pemerintah Kota Denpasar	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi  Y: Kinerja Anggaran	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1. Akuntabilitas pada penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. anggaran akan semakin baik pula. 2. Transparansi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				informasi mengenai kinerja anggaran kurang disampaikan secara terbuka karena informasi mengenai laporan keuangan dianggap lebih penting dan dibutuhkan setiap saat.
2	Muhammad Amin, Maryadi, Sylvia Sjarlis (2022)	Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran	X1: Pengawasan X2: Akuntabilitas X3: Transparansi  Y: Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>	Pada penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Pengawasan Keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i> . 2. Akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>nyata terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>.</p> <p>3. Transparansi Pengelolaan Keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja Anggaran berbasis <i>Value for Money</i>.</p>
3	Puspita Sari, Nurlaila Hanum, Muhammad Salman (2021)	Determinan Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i> Pada Sektor Publik (Studi pada SKPD Aceh Tamiang)	<p>X1: Akuntabilitas</p> <p>X2: Ketepatan Waktu</p> <p>X3: Pengawasan</p> <p>Y: Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>.</p> <p>2. Ketepatan waktu tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>.</p> <p>3. Pengawasan internal</p>



No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> .
4	M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab (2020)	Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i>	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Pengawasan X4: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah  Y: Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> . 2. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> dimana anggaran harus disajikan secara terbuka dan jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>proyek yang dianggarkan oleh pemerintah.</p> <p>3. Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i>.</p> <p>4. Pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i>.</p>
5	Zakaria Batubara, Ria Risna (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran berbasis <i>Value for</i>	X1: Akuntabilitas X2: Partisipasi Masyarakat X3: Pengawasan Y: Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran <i>value for money</i> . Secara

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Money</i> pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis		simultan variabel akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada BPKAD Kabupaten Bengkalis, dari ketiga variabel tersebut yang berpengaruh dominan adalah partisipasi masyarakat.
6	Detasya Rigian, Ratna Purnama Sari (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Kinerja Anggaran berbasis <i>Value for Money</i>	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Pengawasan X4: Partisipasi Anggaran  Y: Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> , tetapi variabel pengawasan tidak memberikan pengaruh terhadap

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				variabel dependen yaitu kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>
7	Victorinus Laoli (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kabupaten Nias	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi  Y: Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa data yang di analisa dengan metode analisis regresi linear berganda membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada Pemerintah Kabupaten Nias. Secara Parsial Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada pemerintah Kabupaten

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Nias. Namun, transparansi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> , meskipun tidak berpengaruh anggaran harus dapat menyajikan informasi secara jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat dari anggaran tersebut.
8	Cindy Afriani (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis <i>Value for Money</i>	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Pengawasan  Y: Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> , namun pada variabel transparansi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura)		terhadap pengelolaan kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> .
9	Budi S Purnomo, Cahaya Putri (2018)	Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Pengawasan  Y: Kinerja Anggaran Dengan Konsep <i>Value for Money</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan telah diimplementasikan dengan sangat memadai, dan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> .
10	I Desak Nyoman Tri Wandari (2016)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Ketepatan Waktu X4: Pengawasan Internal  Y: Kinerja Anggaran Berbasis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng,

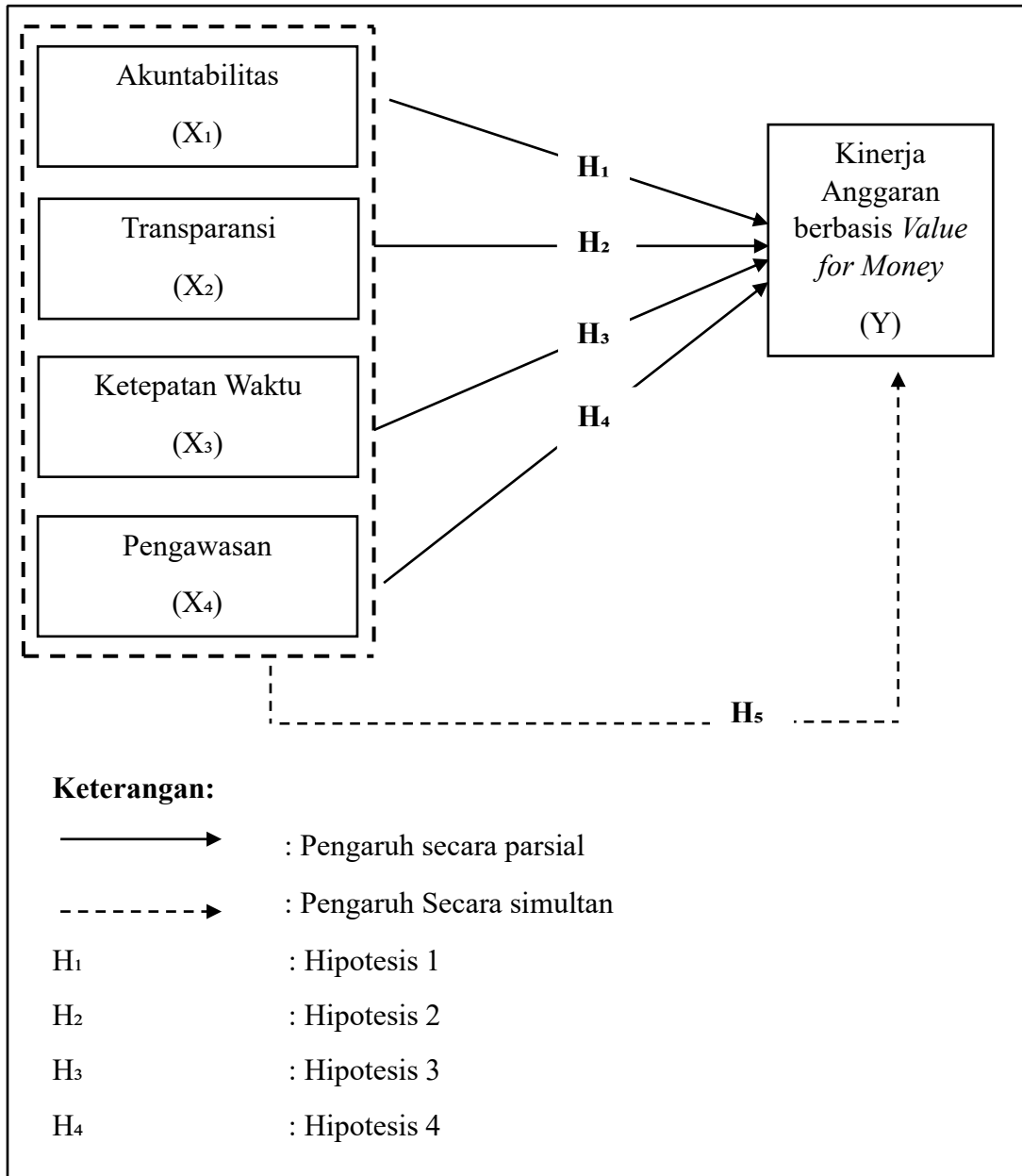
No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>Anggaran dalam konsep <i>Value For Money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng.</p>	<p><i>Value for Money</i></p>	<p>transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng, ketepatan waktu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng, pengawasan internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng.</p>

Sumber: Referensi mulai dari tahun 2016-2023

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:60) mengemukakan bahwa: “Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.”

Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. 2 Paradigma Penelitian



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis berupa suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi. Menurut Sugiyono (2019:37) “Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada di perumusan permasalahan penelitian.” Dalam penelitian ini, terdapat lima hipotesis yang nantinya akan dibahas sesuai dengan paradigma penelitian sebelumnya.

### 2.4.1 Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money*

Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2018) merupakan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Suatu instansi dikatakan akuntabel apabila memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pihak yang mereka percayakan (Arifani dkk., 2018).

Berdasarkan dari peneliti sebelumnya Dahlia Dwi Safitri (2019) menyatakan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, dan didukung oleh peneliti Irna Setiyaningrum (2017) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* karena pada pelaksanaan anggaran dibutuhkan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa agar efisiensi dan efektivitas dapat terjamin sehingga tujuan dan sasaran dapat berhasil dicapai. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

H<sub>1</sub> : Diduga akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### 2.4.2 Transparansi dan Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money*

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaannya sampai hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi dalam anggaran dapat digunakan sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan anggaran seperti korupsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya transparansi membuat masyarakat semakin kritis dalam menilai setiap kejadian yang ada sehingga menjadi alat pengendalian (Arifani, 2018).

Dari penelitian sebelumnya Dahlia Dwi Safitri (2019) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* dan didukung oleh peneliti Sayuti dkk., (2018) bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* karena pada penyelenggaraan pemerintah harus terbuka pada masyarakat umum agar pengumuman anggaran dapat diperoleh setiap saat dan mudah diakses oleh publik.

H<sub>2</sub> : Diduga transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.3 Ketepatan Waktu dan Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money***

Ketepatan waktu menjadi faktor dalam tindakan penyalahgunaan pengelola anggaran dikarenakan kurang adanya ketepatan waktu dalam pelaporan pengelolaan anggaran. Ketepatan waktu adalah suatu informasi yang disampaikan secara tepat waktu dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan (Baridwan, 1997).

Berdasarkan hasil penelitian Lestari dkk., (2017) ketepatan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* dan sejalan dengan penelitian Wandari dkk., (2016) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* karena ketepatan waktu menunjukkan bahwa adanya rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu

maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

H<sub>3</sub> : Diduga ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.4.4 Pengawasan dan Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money***

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Pengawasan adalah penilaian, evaluasi, dan kontrol terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang bertujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan dari peneliti sebelumnya Dahlia Dwi Safitri (2019) menyatakan pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, dan didukung oleh peneliti Irna Setiyaningrum (2017) bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* karena pengawasan anggaran dilakukan untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan metode pengawasan anggaran daerah sesuai dengan undang-undang secara efektif. Dengan demikian, ketika pengawasan dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran akan terlaksana dengan baik dan benar apabila pengawasan dilakukan secara rutin dan langsung melalui kinerja bawahan pengguna anggaran.

H<sub>4</sub> : Diduga pengawasan berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.4.5 Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu, Pengawasan dan Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money***

H<sub>5</sub> : Diduga akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* secara simultan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.